



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 72 TAHUN 2021**

TENTANG

**RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
20. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Badan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Badan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Badan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Badan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Badan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA BADAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN BADAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Badan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Badan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 72**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 72 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut dengan berlandaskan pada tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, merupakan ujung tombak dari pemerintah Kabupaten Garut dalam penanggulangan bencana.

Kabupaten Garut merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia dengan tingkat risiko bencana yang tinggi. Seluruh wilayah Kabupaten garut termasuk kedalam wilayah rawan bencana berdasarkan kondisi geografis, geologis, klimatologis dan demografisnya. Berdasarkan dokumen Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kabupaten Garut menduduki urutan ke 14 dengan skor 205,52 pada tahun 2020.

Kejadian bencana yang sering terjadi di Kabupaten Garut adalah pergerakan tanah (longsor) dan banjir tercatat dalam tiga tahun terakhir terdapat 160 kejadian longsor atau pergerakan tanah di Kabupaten Garut. Kejadian bencana banjir bandang tahun 2016 menjadi titik balik. Selain itu, yang harus diwaspadai oleh Pemerintah Kabupaten Garut yaitu bencana alam Gempa Bumi dibawah dasar laut yang menimbulkan gelombang pasang laut dan Tsunami merupakan salah satu potensi bencana alam yang dapat melanda wilayah pesisir sepanjang pantai wilayah kabupaten Garut. Juga perlu diwaspadai ancaman letusan Gunung berapi Gn.

Papandayan dan Gn. Guntur serta bencana kekeringan yang sering melanda beberapa wilayah di Kabupaten Garut dan tidak menutupi kemungkinan terjadinya bencana non alam seperti akibat kegagalan Teknologi, Epidemologi dan Wabah penyakit serta bencana lainnya.

Seperti terjadinya kejadian luar biasa wabah pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana Nasional. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, penambahan kasus positif di Indonesia maupun Kabupaten Garut menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk menghadapi potensi dan kompleksitas bencana di wilayah Kabupaten Garut di masa mendatang dengan lebih baik diperlukan suatu rencana yang sifatnya terpadu, terkoordinir dan menyeluruh, baik dalam keadaan saat tidak terjadi bencana, saat terjadi bencana, maupun setelah terjadi bencana.

Guna menjamin berlangsungnya pembangunan bidang penanggulangan bencana yang efisien, efektif dan tepat sasaran serta memperhatikan arahan tersebut diatas diperlukan instrumen pertanggungjawaban dalam bentuk Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, sebagai langkah awal untuk mengukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan pembangunan yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

1.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut disusun berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);
21. Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut; 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 49);
22. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 246 Tahun 2014 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut; dan
23. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD/OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut ini antara lain adalah:

Maksud :

- a. Menyediakan dokumen rencana teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah SKPD/OPD sebagai bahan evaluasi kinerja dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis.
- b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah atas pelaksanaan program secara terukur.

Tujuan :

- a. Menjamin tersusunnya rencana program berbasis kinerja yang berorientasi pada pelayanan umum secara terukur;
- b. Menjamin konsistensi perencanaan teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan arahan strategis Visi dan Misi Kabupaten Garut sebagaimana dijabarkan di dalam RPJMD tahun 2019-2024;
- c. Memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja yang terukur, baik dalam bentuk LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah maupun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Kerja BPBD Kabupaten Garut disusun dengan pokok bahasan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

- 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V PENUTUP

- 4.1 Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPBD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BPBD

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut meliputi sasaran, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dengan mengacu pada rencana strategis. Sasaran dalam rencana kerja (Renja) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja BPBD Kabupaten Garut merupakan penjabaran perencanaan tahunan dari Rancangan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Garut, pengukuran tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dan dilaksanakan diantaranya dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPBD Kabupaten Garut yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen LAKIP BPBD Kabupaten Garut Tahun 2020 pada sisi akuntabilitas keuangan, belanja daerah BPBD Kabupaten Garut sebagai berikut :

Belanja Daerah BPBD Kab. Garut

Jenis Belanja	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	Persentase Capaian (%)
Belanja Tidak Langsung	2.897.800.632	2.843.773.648	98,14
Belanja Langsung	5.353.807.100	5.333.569.275	99,62
Jumlah Total	8.251.607.732	8.177.342.923	99,1

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2020, realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 8.177.342.923,- atau sebesar 99,1%,- yang terdiri dari total anggaran belanja Rp. 8.251.607.732,-.

Dalam hal capaian kinerja sasaran program Tahun 2020 terhadap dokumen perencanaan yang ada yaitu Rencana Kerja BPBD Kabupaten Garut Tahun 2022 dan Rencana Strategik BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 dapat diambil kesimpulan secara umum mengenai pencapaian sasaran program/kegiatan terhadap dokumen Renstra BPBD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 menunjukkan kinerja sasaran yang cukup baik.

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam renja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Dalam jangka waktu yang pendek pengukuran meliputi masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*), sedangkan untuk mengukur kinerja dalam jangka waktu yang relatif panjang dalam renja ini tidak dilakukan pengukuran, karena memerlukan waktu yang relatif panjang.

Pelaksanaan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut tahun anggaran 2022 dengan capaian yang telah tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 (tahun berjalan)

Kabupaten Garut

Nama SKPD : BPBD

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra SKPD Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun n-3 (Tahun 2019)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD Tahun 2020			Target program dan kegiatan 2021 (Renja SKPD tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan 2021	
					Target Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Realisasi Renja SKPD tahun 2020 (n-2)	Tingkat Realisasi %		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan tahun berjalan 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan penyelesaian perencanaan								
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dok	4 dok	4 dokumen dan 1 aplikasi	1 dokumen	69%	4 dok		
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	4 lap	-	7 dokumen	4 dokumen	44%	4 lap	1 laporan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan								

2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan	29 orang					29 orang	29 orang (3 bulan)	
3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah								
3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	4 orang	5 orang	5 orang	5 orang	41%	4 orang		
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	60 orang	180 stel	30 orang PNS, 5 orang TKK, dan 25 orang Pusdalops	-	-	60 orang		
4.2	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik yang disediakan		102 stel dan 200 buah	-	-	-			
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	3 jenis	4 jenis	5 jenis	5 jenis	34%	3 jenis	3 jenis	
5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	84 jenis	48 jenis	54 jenis	43 jenis	97,5%	84 jenis		
5.3	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	13 jenis	15 jenis	15 jenis	23%	2 jenis		

5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 jenis	6 jenis	6 jenis barang cetakan dan 107268 lembar	6 jenis barang cetakan dan 107268 lembar	44%	7 jenis	7 jenis	
5.5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	50%	4 jenis		
5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	waktu pemenuhan fasilitas makanan dan minuman	60 orang	35 orang (1422 dus)	30 orang PNS, 5 orang TTK, dan 25 orang Pusdalops	30 orang PNS, 5 orang TTK, dan 25 orang Pusdalops	40%	60 orang	60 orang	
5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi kedalam daerah dan luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	30%	12 bulan	2 bulan	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan Pemerintah Daerah								
6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	6 bulan	45%	12 bulan	3 bulan	
6.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	38 unit	28 unit	28 unit	44%	2 jenis		
6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2 orang	4 orang	4 orang	4 orang	41%	2 orang	2 orang	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								

7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	66%	12 bulan	12 bulan	
7.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit	2 unit dan 900 m2	2 unit dan 443 m2	-	-	2 unit		
8	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
8.1	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang di bangun	-	1 unit (100 M2)	2 unit	2 unit	100%	-		
8.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang disediakan	-	-	1 unit mobil dan 3 unit motor	1 unit mobil dan 3 unit motor	100%	-		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
9	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									
9.1	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dok	-	-	-	-	1 dok		
9.2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penyediaan dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana	1 keg	1 Aplikasi	165 rambu-rambu dan 1 film animasi kebencanaan	-	-	1 keg		
10	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana								

10.1	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang ikut pelatihan	280 orang	60 orang	100 orang	100 orang	100%	280 orang		
10.2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan TRC		60 orang	60 orang	-	-			
10.3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terlibat dalam kesiapsiagaan terhadap bencana	420 orang	-	1 dokumen	6 bulan (draft dokumen)	54%	420 orang	60 orang	
10.4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	21 jenis	-	40 set, 100 buah APD, 1 unit genset, 2 unit mobil tangki air, 2 unit perahu karet, 3 unit chainsaw, 5 unit pemecah beton, dan 12 unit mesin penyedot air, dan 7 jenis	, 3 unit chainsaw, 5 unit pemecah beton, dan 12 unit mesin penyedot air	50%	21 jenis		
10.5	Gladi Kesiapan terhadap Bencana	Jumlah orang yang ikut gladi dan simulasi penanggulangan bencana		-	600 orang	-	-			
10.6	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Lokasi kegiatan pasca bencana		8433 M2, 1 unit ambulance dan 9 jenis perlengkapan kebencanaan	Kabupaten Garut	Kabupaten Garut	50%			
10.7	Penyusunan Dokumen Kebencanaan	Jumlah dokumen kebencanaan yang tersusun		4 dok	-	-	-			
11	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana									

11.1	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah satgas yang terlibat dalam penanggulangan bencana	25 orang	25 orang	25 orang	25 orang	50%	25 orang	25 orang	
11.2	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah set paket pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	18 jenis	-	500 set sembako, 500 buah peralatan kebencanaan, dan 500 set bahan sandang	-		18 jenis		
12	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya penataan Sistem dasar penanggulangan bencana								
12.1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Perda Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan		1 buah perda	-	-	-			
12.2	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana	3 desa	3 Desa	5 desa	2 desa	94%	3 desa	3 desa	
12.3	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah kejadian bencana yang di monitoring dan dievaluasi		42 kec	-	-	-			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (BPBD)

Kajian capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum bisa dilakukan karena belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut

No	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	Tahun 2020 (thn n-2)	Tahun 2021 (thn n-1)	Tahun 2022 (thn n)	Tahun 2023 (thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Presentase peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap bencana	100%	100%	100%	100%	82,5%	-	100%	100%	
2	Presentase perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan pendampingan non fisik	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Presentase perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana fisik dan pendampingan non fisik	100%	100%	100%	100%	54,6%	-	100%	100%	
3	Presentase penanganan kedaruratan bencana	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Presentase penanganan kedaruratan bencana	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selanjutnya disebut BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden yang dibentuk dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, selanjutnya disebut BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah.
7. Daerah rawan bencana adalah Daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
8. Lembaga independen adalah lembaga/organisasi yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana dan tidak memiliki kepentingan atau keberpihakan terhadap pihak-pihak tertentu dalam pemilihan calon anggota unsur pengarah penanggulangan bencana.

Dari hal tersebut di atas dapat disimpulkan isu dan masalah strategis dimana prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana di Kabupaten Garut belum memadai untuk memenuhi seluruh dan amanat aturan dan regulasi

yang dikehendaki sesuai dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi, kurang memadainya anggaran dalam rangka penanggulangan bencana, kurang terpadunya penyelenggaraan penanganan bencana yang berjalan secara sektoral serta belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana dan masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Isu-isu Strategis :

Bahaya

- a. Meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam maupun non alam seperti pandemi Covid-19.
- b. Karakteristik geografis Kabupaten Garut yang memiliki risiko bencana tinggi.

Kerentanan

- a. Tingginya tingkat kerentanan.

Kapasitas

- a. Belum optimalkan pendekatan pentaheliks dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- b. Masih perlu peningkatan implementasi SPM sub urusan bencana.
- c. Masih perlu dioptimalkannya dukungan anggaran yang memadai.

Anggaran BPBD dalam penanggulangan bencana kurun waktu 3 tahun adalah sebagai berikut:

Tahun 2019 sebesar Rp. 43.828.957.214,- (ada bantuan BNPB untuk penanganan pasca bencana banjir bandang).

Tahun 2020 sebesar Rp. 5.353.807.100,-

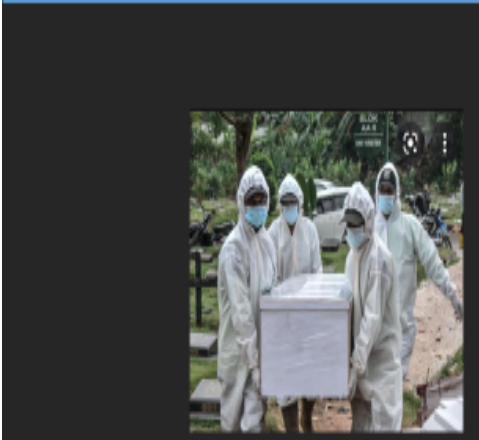
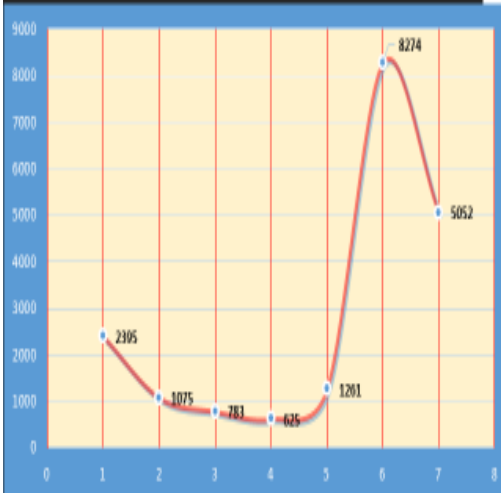
Tahun 2021 sebesar Rp. 7.720.970.000,-

- d. Masih kurangnya mitigasi bencana dalam upaya pencegahan guna mengurangi risiko ancaman bencana

- e. Manajemen logistik dan peralatan yang andal. Kondisi sekarang gudang tempat penyimpanan logistik dan peralatan masih bersatu karena gudangnya belum tersedia.
- f. Pengembangan kapasitas merupakan kata kunci pengelolaan bencana yang berkualitas, melalui pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana.
- g. Optimalisasi penyebaran informasi dan pengetahuan ke masyarakat, melalui teknologi informasi dan komunikasi (seperti sosial media)
- h. Kajian, Perencanaan dan Penanganan Risiko Bencana yang berkelanjutan sebagai acuan perencanaan pembangunan.
- i. Pemulihan Pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan (*build back better*).

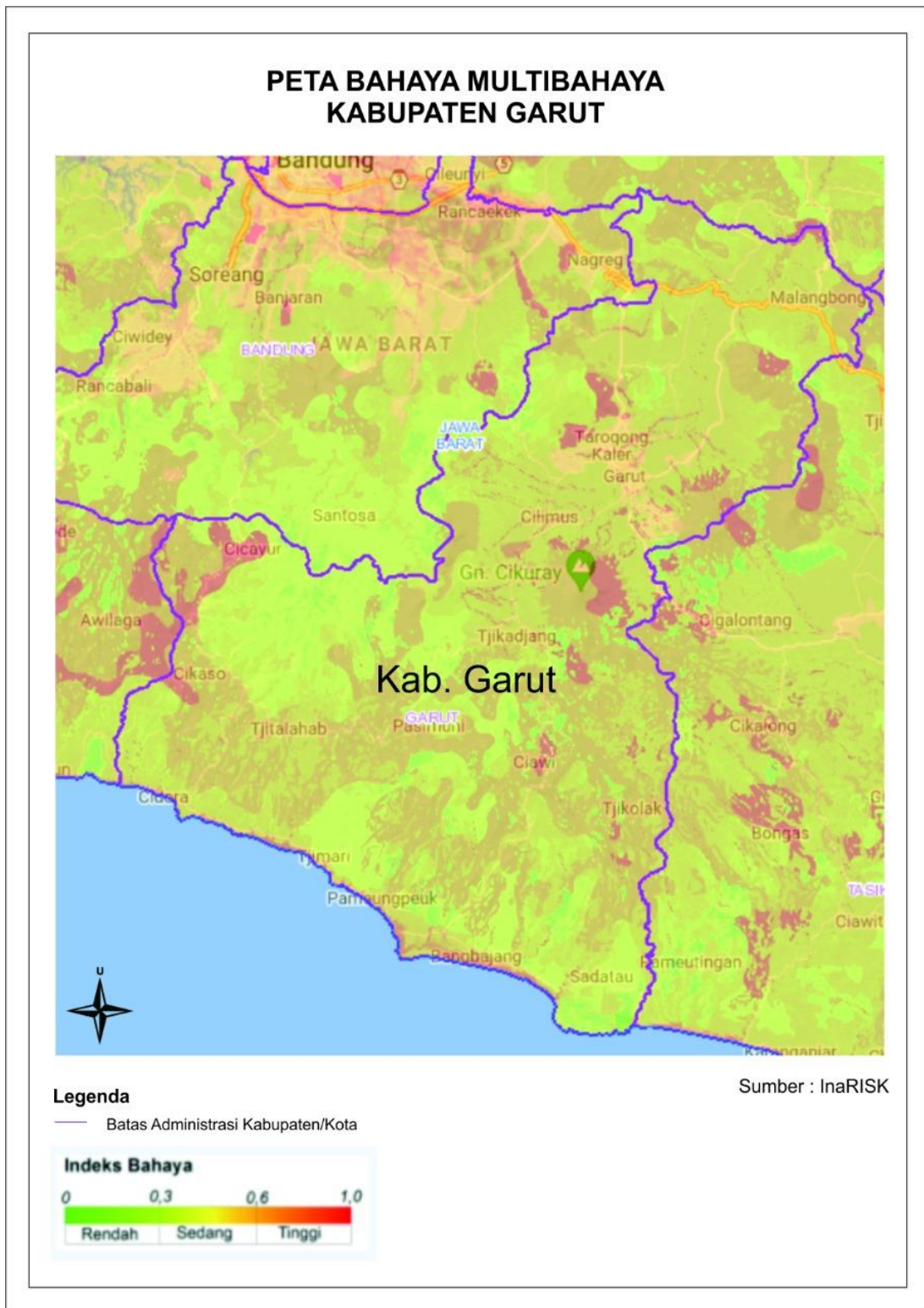
TREND KASUS KONFIRMASI COVID-19

Trend kasus Konfirmasi dan Kematian Periode Maret 2020 s.d Juli 2021



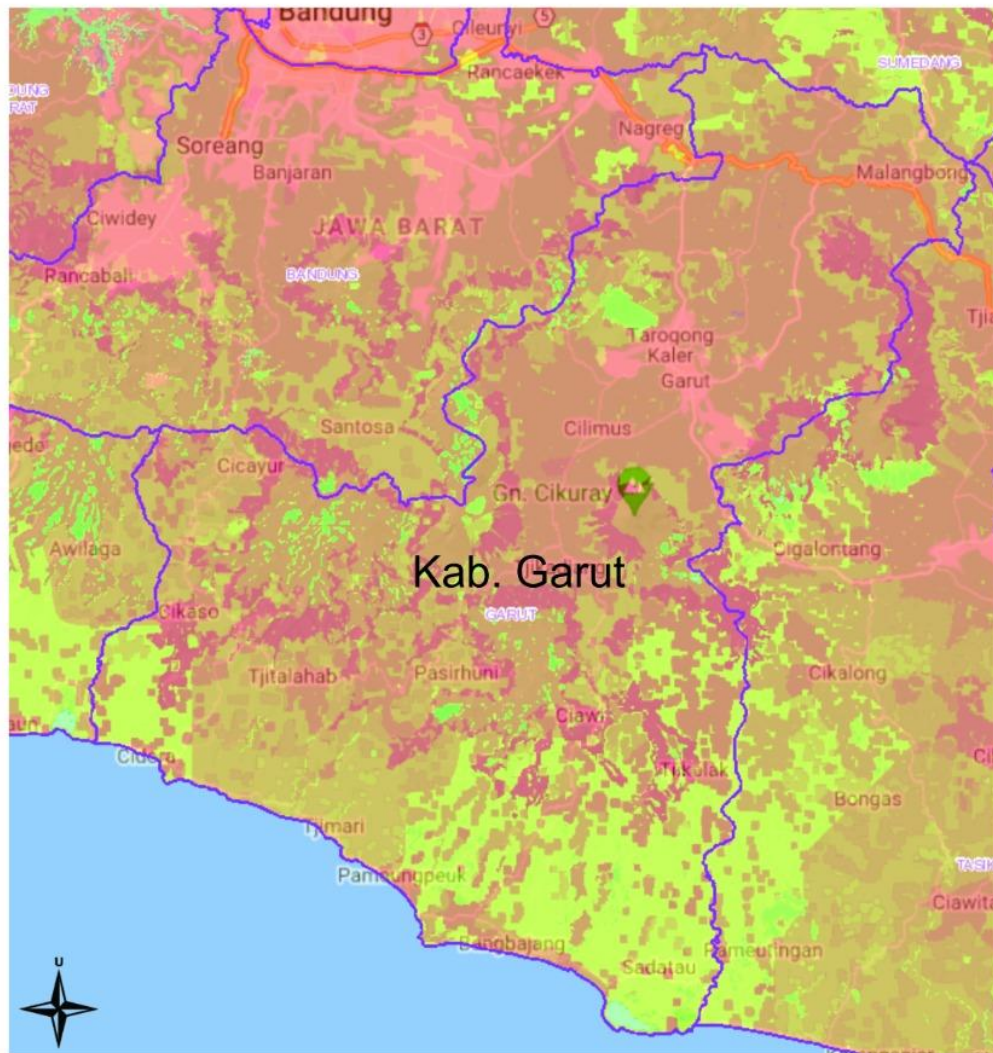
Bulan	Tahun	Jumlah Konfirmasi	Kasus Meninggal	CFR %
Maret	2020	7	1	14,29
April	2020	4	0	0,00
Mei	2020	5	1	20,00
Juni	2020	10	1	10,00
Juli	2020	11	0	0,00
Agustus	2020	48	0	0,00
September	2020	167	9	5,39
Oktober	2020	468	3	0,64
November	2020	1192	33	2,77
Desember	2020	1974	58	2,94
Januari	2021	2395	94	3,92
Februari	2021	1075	61	5,67
Maret	2021	783	49	6,26
April	2021	625	46	7,36
Mei	2021	1261	71	5,63
Juni	2021	8274	349	4,22
Juli	2021	5052	336	6,65
S.d 01 Agustus	2021	44	5	11,36
		23395	1117	4,77

Karakteristik Geografis Kabupaten Garut yang Memiliki Risiko Bencana Tinggi



Gambar 2.1. Peta Bahaya Multibahaya Kabupaten Garut

PETA KERENTANAN MULTIBAHAYA KABUPATEN GARUT



Legenda

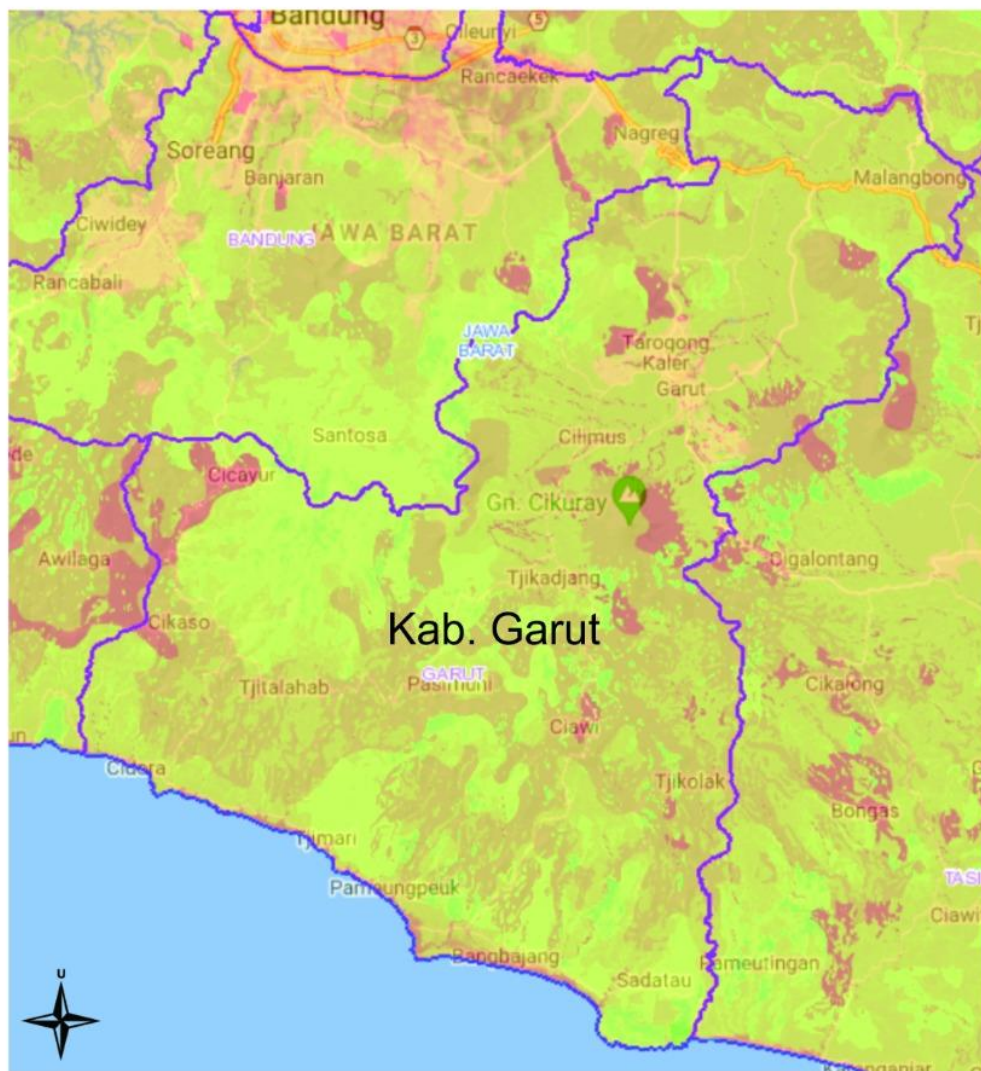
— Batas Administrasi Kabupaten/Kota



Sumber : InaRISK

Gambar 2.2. Peta Kerentanan Multibahaya Kabupaten Garut

PETA BAHAYA MULTIBAHAYA KABUPATEN GARUT



Legenda

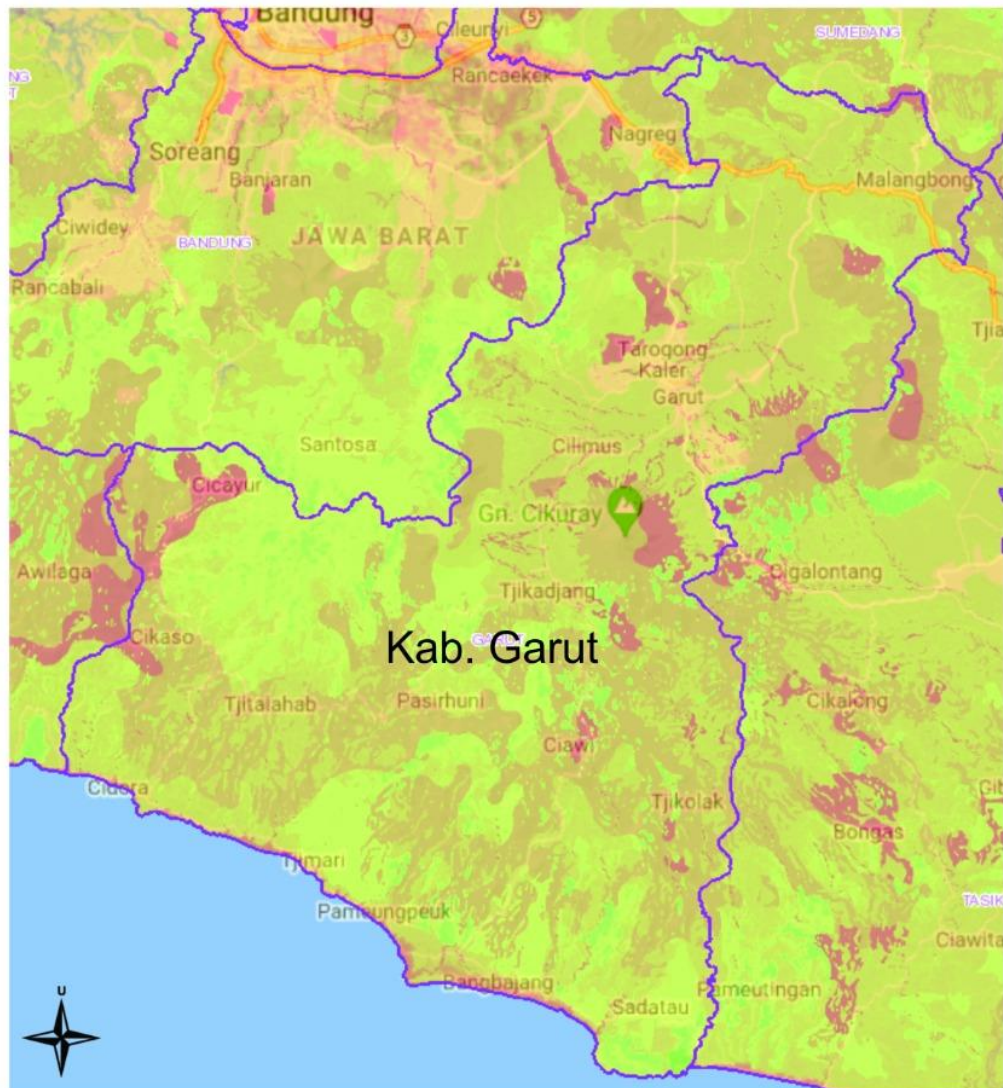
— Batas Administrasi Kabupaten/Kota



Sumber : InaRISK

Gambar 2.3. Peta Kapasitas Multibahaya Kabupaten Garut

PETA RISIKO MULTIBAHAYA KABUPATEN GARUT



Legenda

— Batas Administrasi Kabupaten/Kota



Sumber : InaRISK

Gambar 2.4. Peta Bahaya Multibahaya Kabupaten Garut

Tingkat Kerentanan Bencana Kabupaten Garut

No.	Jenis Bahaya	Tingkat Bahaya	Tingkat Kerentanan
1	Epidemi dan wabah penyakit	Sedang	Rendah
2	Kekeringan	Sedang	Tinggi
3	Kegagalan Teknologi	Sedang	Sedang
4	Gempa Bumi	Tinggi	Tinggi
5	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi	Sedang
6	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi	Sedang
7	Banjir		Sedang
8	Angin Puting Beliung & Cuaca Ekstrim	Sedang	Sedang
9	Tanah Longsor	Sedang	Tinggi
10	Tsunami	Sedang	Sedang
11	Letusan Gunung Api		Sedang
	Gunung Papandayan	Sedang	Sedang
	Gunung Guntur	Sedang	Sedang

Sumber : Dokumen KRB BPBD Kab. Garut 2019-2024

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan prioritas terdiri dari 2 program, 12 kegiatan, dan 44 sub kegiatan pada rancangan awal RKPD, setelah hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan terdiri dari 2 program, 12 kegiatan, dan 44 sub kegiatan, secara rinci disajikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.504.998.668	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				10.489.146.806	
I	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	60.000.000	Kegiatan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	60.000.000	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokume n	30.000.000	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	4 dokume n	30.000.000	
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	4 laporan	30.000.000	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	4 laporan	30.000.000	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	3.645.654.247	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	3.645.654.247	
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarogong Kidul (BPBD)	Penyediaan gaji dan tunjangan	1 tahun	3.645.654.247	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tarogong Kidul (BPBD)	Penyediaan gaji dan tunjangan	1 tahun	3.645.654.247	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	110.671.621	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	110.671.621	

	4	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	4orang	110.671.621	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	4orang	110.671.621	
IV		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	300.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	300.000.000	
	5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	60 stel	100.000.000	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	60 stel	100.000.000	
	6	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah peserta pelatihan teknis kebencanaan	60 orang	200.000.000	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah peserta pelatihan teknis kebencanaan	60 orang	200.000.000	
V		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	545.000.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	545.000.000	
	7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	15.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis	15.000.000	
	8	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	67 jenis	200.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	67 jenis	200.000.000	
	9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis	10.000.000	
	10	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	30.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 jenis	30.000.000	
	11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	10.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	4 jenis	10.000.000	

	12	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		waktu pemenuhan fasilitas makanan dan minuman	12 bulan	30.000.000	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu		waktu pemenuhan fasilitas makanan dan minuman	12 bulan	30.000.000	
	13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Waktu pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi kedalam daerah dan luar daerah	12 bulan	250.000.000	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tarogong Kidul (BPBD)	Waktu pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi kedalam daerah dan luar daerah	12 bulan	250.000.000	
VI		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	144.312.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	144.312.000	
	14	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tarogong Kidul (BPBD)	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air	12 bulan	44.312.000	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tarogong Kidul (BPBD)	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air	12 bulan	44.312.000	
	15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	20.000.000	
	16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2 orang	80.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2 orang	80.000.000	
VII		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	799.999.800	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	799.999.800	
	17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarogong Kidul (BPBD)	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	12 bulan	400.000.000	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tarogong Kidul (BPBD)	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	12 bulan	400.000.000	

	18	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit	399.999.800	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah gedung yang dipelihara	2 unit	399.999.800	
VIII		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	4.899.361.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Indeks kepuasan masyarakat	78 poin	4.899.361.000	
	19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah unit kendaraan operasional yang disediakan	2 unit	1.100.000.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah unit kendaraan operasional yang disediakan	2 unit	1.100.000.000	
	20	Pengadaan Mebel	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah jenis mebel yang disediakan	5 jenis	100.000.000	Pengadaan Mebel	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah jenis mebel yang disediakan	5 jenis	100.000.000	
	21	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah gedung kantor yang di bangun	1 gedung	3.699.361.000	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Tarogong Kidul (BPBD)	Jumlah gedung kantor yang di bangun	1 gedung	3.699.361.000	
B		Program Penanggulangan Bencana			0,4poin	9.557.829.300	Program Penanggulangan Bencana			0,4poin	9.557.829.300	
IX		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.312.764 jiwa (100%)	2.212.439.900	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.312.764 jiwa (100%)	2.212.439.900	

	22	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dok	267.271.900	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dok	267.271.000	
	23	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Garut	Jumlah penyediaan dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana	1 keg	1.945.168.000	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Kab. Garut	Jumlah penyediaan dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana	1 keg	1.945.168.000	
X		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.312.764 jiwa (100%)	3.896.723.000	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.312.764 jiwa (100%)	3.896.723.000	
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1 dok	221.765.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1 dok	221.765.000	
	25	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah peserta yang ikut pelatihan	560 orang	300,000,000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah peserta yang ikut pelatihan	560 orang	300,000,000	
	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana	25 orang	238.822.000	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana	25 orang	238,822,000	
	27	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 paket	1,000,000,000	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 paket	1,000,000,000	
	28	Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen IKD sampai dengan sah/legal	1 dok	50,000,000	Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen IKD sampai dengan sah/legal	1 dok	50,000,000	

	29	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen peta kerentanan sampai dengan sah/legal	1 Kab Garut	-	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen peta kerentanan sampai dengan sah/legal	1Kab Garut	-	
	30	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana	1 dok	1,500,000,000	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana	1 dok	1,500,000,000	
	31	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan TRC	1 lokasi kab. Garut	114.560.000	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan TRC	1 lokasi kab. Garut	114.560.000	
	32	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Kontijensi sampai dengan sah/legal per jenis bencana	50 orang	171.576.000	Penyusunan Rencana Kontijensi	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Kontijensi sampai dengan sah/legal per jenis bencana	50 orang	171.576.000	
	33	Gladi Kesiapan terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah orang yang ikut gladi dan simulasi penanggulangan bencana	3 jenis	200.000.000	Gladi Kesiapan terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah orang yang ikut gladi dan simulasi penanggulangan bencana	3 jenis	200.000.000	
	34	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana sampai dengan sah/legal	100 orang	100.000.000	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Kab. Garut	Jumlah penyelesaian dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana sampai dengan sah/legal	100 orang	100.000.000	
XI		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.312.764 jiwa (100%)	1.800.000.000	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2.312.764 jiwa (100%)	1.800.000.000	

	35	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Garut	Lokasi penanganan kasus KLB	1 Kab Garut	200.000.000	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Kabupaten Garut	Lokasi penanganan kasus KLB	1 Kab Garut	200.000.000	
	36	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Lokasi penanganan darurat bencana	1 Kab Garut	1.000.000.000	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Lokasi penanganan darurat bencana	1 Kab Garut	1.000.000.000	
	37	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Lokasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Kab Garut	200.000.000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Lokasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Kab Garut	200.000.000	
	38	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah penyediaan kebutuhan korban bencana	500 paket	200.000.000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Jumlah penyediaan kebutuhan korban bencana	500 paket	200.000.000	
	39	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Garut	Lokasi aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Kab Garut	100.000.000	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Garut	Lokasi aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	1 Kab Garut	100.000.000	
	40	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Kab. Garut	Lokasi penanganan bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	1 Kab Garut	100.000.000	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Kab. Garut	Lokasi penanganan bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	1 Kab Garut	100.000.000	
XII		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase penguatan kapasitas penanggulangan bencana	100%	1.648.666.400	Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase penguatan kapasitas penanggulangan bencana	100%	1.648.666.400	

	41	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase Perda Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan	100%	148.666.400	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase Perda Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan	100%	148.666.400	
	42	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase FPRB yang telah terbentuk	80%	100.000.000	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase FPRB yang telah terbentuk	80%	100.000.000	
	43	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase Jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana	20%	300.000.000	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Kab. Garut	Persentase Jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana	20%	300.000.000	
	44	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Garut	Persentase pemanfaatan sitem peringatan dini per jenis bencana	100%	1.000.000.000	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Kab. Garut	Persentase pemanfaatan sitem peringatan dini per jenis bencana	100%	1.000.000.000	
	45	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Garut	Persentase Jumlah kejadian bencana yang di monitoring dan dievaluasi	100%	100.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kab. Garut	Persentase Jumlah kejadian bencana yang di monitoring dan dievaluasi	100%	100.000.000	
						20.062.827.968					20.062.827.968	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan terkait langsung dengan pelayanan provinsi dan hasil pelaksanaan musrenbang kabupaten.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022 Kabupaten Garut

Nama Perangkat Daerah: BPBD Kab. Garut

No	Program/ Kegiatan	Program/Ke giatan/ Sub Kegiatan (Permen- dagri 90)	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Program Penanggulan gan Bencana Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kab. Garut	Jumlah peserta yang ikut pelatihan penanggulan gan bencana	1 paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan Kebijakan Nasional

Sejarah lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terbentuk tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana pada masa kemerdekaan hingga bencana alam berupa gempa bumi dahsyat di Samudera Hindia pada abad 20. Sementara itu, perkembangan tersebut sangat dipengaruhi pada konteks situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan bencana.

Melihat kenyataan saat ini, berbagai bencana yang dilatarbelakangi kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis mendorong Indonesia untuk membangun visi untuk membangun ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Wilayah Indonesia merupakan gugusan kepulauan terbesar di dunia. Wilayah yang juga terletak di antara benua Asia dan Australia dan Lautan Hindia dan Pasifik ini memiliki 17.508 pulau. Meskipun tersimpan kekayaan alam dan keindahan pulau-pulau yang luar biasa, bangsa Indonesia perlu menyadari bahwa wilayah nusantara ini memiliki 129 gunung api aktif, atau dikenal dengan ring of fire, serta terletak berada pada pertemuan tiga lempeng tektonik aktif dunia?Lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik.

Ring of fire dan berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menempatkan negara kepulauan ini berpotensi terhadap ancaman bencana alam. Di sisi lain, posisi Indonesia yang berada di wilayah tropis serta kondisi hidrologis memicu terjadinya bencana alam lainnya, seperti angin puting beliung, hujan ekstrim, banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tidak hanya bencana alam sebagai ancaman, tetapi juga bencana non alam sering melanda tanah air seperti kebakaran hutan dan lahan, konflik sosial, maupun kegagalan teknologi.

Menghadapi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Indonesia berperan penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana di tanah air. Pembentukan lembaga merupakan salah satu bagian dari sistem yang telah berproses dari waktu ke waktu. Lembaga ini telah hadir sejak kemerdekaan dideklarasikan pada tahun 1945 dan perkembangan lembaga penyelenggara penanggulangan bencana dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut.

Tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi saat itu, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksana harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama.

Dalam merespon sistem penanggulangan bencana saat itu, Pemerintah Indonesia sangat serius membangun legalisasi, lembaga, maupun *budgeting*. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB terdiri atas kepala, unsur pengarah penanggulangan bencana, dan unsur pelaksana penanggulangan bencana. BNPB memiliki fungsi pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Visi BNPB Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana.

Misi Melindungi bangsa dari ancaman bencana melalui

- Pengurangan risiko
- Membangun sistem penanggulangan bencana yang handal
- Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh

Arah kebijakan dan Strategi BNPB 2020-2024

No	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Peningkatan sistem dan strategi penanggulangan bencana yang andal, inovatif, kolaboratif dan implementatif.	Penguatan system, strategi dan tata kelola penanggulangan bencana.
2.	Peningkatan kesiapsiagaan pemerintah/ pemerintah daerah, Lembaga usaha, masyarakat, akademisi dan media yang terkoordinasi dalam menghadapi bencana.	Penguatan ketahanan bencana di daerah rawan bencana.
3.	Peningkatan layanan darurat bencana yang cepat, tepat, dan terkoordinasi.	Penguatan koordinasi dan komando penanganan darurat.
4.	Peningkatan layanan pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana guna mendukung pencapaian kebutuhan dasar dan kehidupan masyarakat di wilayah terdampak bencana yang berkualitas.	Penguatan sumber daya pendampingan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana
5.	Penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan	Penguatan tata kelola logistic dan peralatan nasional.
6.	Penguatan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang professional dan inklusif	Penguatan tata kelola penanggulangan bencana

Telaahan Kebijakan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Barat

BPBD Provinsi Jawa Barat, sebagai salah satu OPD, yang mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang sosial berdasarkan asas otonomi, asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, mengemban amanah untuk mewujudkan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mengokohkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan melalui Peningkatan Peran Pemuda, Olah Raga, Seni, Budaya dan Pariwisata dalam Bingkai Kearifan Lokal.

Dalam upaya menjawab isu dan permasalahan dalam penanggulangan bencana, maka tujuan jangka menengah BPBD Provinsi Jawa Barat adalah Meningkatkan Sistem Penanggulangan Bencana yang tangkas, tanggap dan tangguh dan sesuai Undang – undang No 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana yang terintegrasi.

Sasaran jangka menengah BPBD Provinsi Jawa Barat periode 2018 -2023 yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Kapasitas Daerah Penanggulangan Bencana dan Menurunkan Kerentanan daerah-daerah seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Barat untuk menjadikan masyarakat Jawa Barat Tangguh Menghadapi Bencana.

Sasaran tersebut di atas diukur keberhasilannya melalui 1 Indikator yang diklasifikasikan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur terpilih dan Indikator Kinerja BPBD Provinsi Jawa Barat yaitu dengan mengukur Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Barat.

Nilai-nilai (*values*) adalah hal-hal yang dijunjung tinggi oleh organisasi dalam perjalanan mewujudkan visi. Dengan kata lain nilai merupakan prinsip sosial, tujuan, ataupun norma yang diterima oleh individu organisasi atau masyarakat. Nilai memberikan batasan dan tuntunan dalam pemilihan cara-cara yang ditempuh dalam mewujudkan visi. Atas dasar nilai itu maka tidak semua cara dapat ditempuh.

Untuk mencapai Tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka nilai utama yang dijadikan pedoman adalah:

1. Memantapkan, memanfaatkan serta memaksimalkan sumberdaya manusia yang proaktif sebagai pelaku pencegahan bencana.
2. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja aparatur serta SDM binaan yang terkait, guna meningkatkan kualitas dan produktifitas penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan.
3. Komitmen dukungan kapital/anggaran dari Pemerintah yang berkelanjutan dan berkesinambungan sesuai standar kegiatan terkait.
4. Mengadakan perbaikan-perbaikan/peningkatan manajemen kebencanaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui kegiatan pencegahan bencana.
5. Memperhatikan, mendayagunakan potensi kearifan budaya lokal yang dijiwai norma-norma keagamaan sebagai dasar penciptaan iklim yang kondusif sebagai penangkal kerawanan bencana.
6. Memanfaatkan para praktisi pemerhati bidang kebencanaan, ilmuwan/ cendekiawan, LSM dan sebagainya untuk saling bahu membahu bekerjasama guna mengatasi permasalahan yang ada demi kemajuan pembangunan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut.

➤ **Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Tugas Pokok

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mempunyai tugas:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
7. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
8. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 tahun 2011 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mempunyai Fungsi :

1. Fungsi Koordinasi merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana;
2. Fungsi Komando merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;

3. Fungsi pelaksana merupakan fungsi pelaksana unsur pelaksana BPBD Kabupaten Garut yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang ditetapkan sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan tingkat kewenangan dan karakteristik wilayahnya.
2. Menentukan status dan tingkatan keadaan darurat bencana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Mengerahkan seluruh potensi/sumberdaya yang ada di wilayahnya untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
4. Menjalin kerjasama dengan daerah lain atau pihak-pihak lain guna mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman yang berisiko menimbulkan bencana.
6. Mencegah dan mengendalikan penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayah kewenangannya.
7. Mengangkat seorang komandan penanganan darurat bencana atas usul Kepala BPBD.
8. Melakukan pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain (misalnya relawan) yang diperuntukkan untuk

penanggulangan bencana di wilayahnya, termasuk pemberian ijin pengumpulan sumbangan di wilayahnya.

9. Menyusun perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

Tujuan

Tujuan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana diantaranya sbb : Terwujudnya Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari dan Berkelanjutan, sedangkan tujuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Terwujudnya Kabupaten Garut yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana.

Sasaran

Sasaran dari RPJMD adalah Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana, sedangkan sasaran Sasaran Renstra (IKU Kepala Perangkat Daerah adalah Meningkatnya kapasitas dalam pengurangan risiko bencana.

3.3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang di rencanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mempertimbangkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman. Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Perkiraan Maju Tahun 2023
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Garut

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indek Kepuasan Masyarakat		78 poin	10.504.998.668				6.651.154.247
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan		100%	60,000,000			100%	60.000.000
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Tarogong Kidul (BPBD)	4 dokumen	30,000,000	DAU		4 dok	30,000,000
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	Tarogong Kidul (BPBD)	4 laporan	30,000,000	DAU		4 lap	30,000,000
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		100%	3,645,654,247			100%	3,645,654,247
	3 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	Tarogong Kidul (BPBD)	1 tahun	3,645,654,247	DAU		1 tahun	3,645,654,247
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		100%	110.671.621			100%	110.500.000

	4	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	4orang	110.671.621	DAU		4 orang	110,500,000
IV		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	300,000,000			100%	350.000.000
	5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	60 stel	100,000,000	DAU		60 stel	150,000,000
	6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pelatihan teknis kebencanaan	Tarogong Kidul (BPBD)	60 orang	200,000,000	DAU		60 orang	200,000,000
V		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran		100%	545,000,000			100%	550.000.000
	7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	5 jenis	15,000,000	DAU		4 jenis	20,000,000
	8	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	67 jenis	200,000,000	DAU		10 jenis	200,000,000
	9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	2 jenis	10,000,000	DAU		10 jenis	10,000,000
	10	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	6 jenis	30,000,000	DAU		6 jenis	30,000,000
	11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	4 jenis	10,000,000	DAU		4 jenis	10,000,000
	12	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	waktu pemenuhan fasilitas makanan dan minuman		12 bulan	30,000,000	DAU		12 bulan	30,000,000

	13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi kedalam daerah dan luar daerah	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	250,000,000	DAU		12 bulan	250,000,000
VI		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.		100%	144.312.000			100%	135.000.000
	14	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	44.312.000	DAU		12 bulan	35,000,000
	15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	20,000,000	DAU		12 bulan	20,000,000
	16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	2 orang	80,000,000	DAU		2 orang	80,000,000
VII		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan barang milik daerah		100%	799.999.800			100%	700.000.000
	17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	400,000,000	DAU		12 bulan	300,000,000
	18	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Tarogong Kidul (BPBD)	2 unit	399.999.800	DAU		1 gedung	400,000,000
VIII		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan barang milik daerah		100%	4.899.361.000			100%	1.100.000.000
	19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	2 unit	1.100,000,000	DAU		2 unit	1,000,000,000
	20	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	5 jenis	100,000,000	DAU		5 jenis	100,000,000

	21	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang di bangun	Tarogong Kidul (BPBD)	1 gedung	3.699.361.000	DAU		1 lokasi	0
B		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana		0,4 poin	9.557.829.300			0,4 poin	13.800.000.000
IX		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		2.312.764 jiwa (100%)	2.212.439.900			100%	3.000.000.000
	22	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Garut	1 dok	267.271.900	DAU		1 dok	500,000,000
	23	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penyediaan dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana	Kab. Garut	1 keg	1.945.168.000	DAU		1 keg	2.500,000,000
X		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2.312.764 jiwa (100%)	3.896.723.000			100%	6.100.000.000
	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kab. Garut	1 dok	221.765.000	DAU			400.000.000
	25	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang ikut pelatihan	Kab. Garut	560 orang	300,000,000	DAU		560 orang	600,000,000
	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana	Kab. Garut	25 orang	238.822.000	DAU		25 orang	300,000,000
	27	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Garut	1 paket	1,000,000,000	DAU		5 perahu karet, 1 paket perlengkapan dapur umum, 1 unit mobil tanky air, 5 unit wc portable, 20 pelampung, 200 paket APD	2,000,000,000

	28	Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen IKD sampai dengan sah/legal	Kab. Garut	1 dok	50,000,000	DAU		1 dok	100,000,000
	29	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah penyelesaian dokumen peta kerentanan sampai dengan sah/legal	Kab. Garut	1Kab Garut	-	DAU		1 dok	200,000,000
	30	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi pemulihan pasca bencana	Kab. Garut	1 dok	1,500,000,000	DAU		1 lokasi kab.Garut	2,000,000,000
	31	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparaturnya yang ikut pelatihan TRC	Kab. Garut	1 lokasi kab. Garut	114.560.000	DAU		50 orang	200,000,000
	32	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Kontijensi sampai dengan sah/legal per jenis bencana	Kab. Garut	50 orang	171.576.000	DAU		1 dokumen	0
	33	Gladi Kesiapan terhadap Bencana	Jumlah orang yang ikut gladi dan simulasi penanggulangan bencana	Kab. Garut	3 jenis	200,000,000	DAU		100 orang	300,000,000
	34	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana sampai dengan sah/legal	Kab. Garut	100 orang	100,000,000	DAU		1 dok	0
XI		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		2.312.764 jiwa (100%)	1,800,000,000			100%	1.900.000.000
	35	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Lokasi penanganan kasus KLB	Kabupaten Garut	1 Kab Garut	200,000,000	DAU		Kab Garut	200,000,000
	36	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Lokasi penanganan darurat bencana	Kab. Garut	1 Kab Garut	1,000,000,000	DAU		Kab Garut	1,000,000,000

	37	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Lokasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Garut	1 Kab Garut	200,000,000	DAU		Kab Garut	200,000,000
	38	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan korban bencana	Kab. Garut	500 paket	200,000,000	DAU		500 paket	200,000,000
	39	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Lokasi aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Kab. Garut	1 Kab Garut	100,000,000	DAU		Kab Garut	100,000,000
	40	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Lokasi penanganan bencana non alam epidemii/ wabah penyakit	Kab. Garut	1 Kab Garut	100,000,000	DAU		100%	200.000.000
XII		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase terlaksananya penataan Sistem dasar penanggulangan bencana		60%	1.648.666.400			60%	2.800.000.000
	41	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Perda Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan	Kab. Garut	100%	148.666.400	DAU		1 Perda	0
	42	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase FPRB yang telah terbentuk	Kab. Garut	80%	100,000,000	DAU		1 kegiatan	200,000,000
	43	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Desa/Kel Tangguh Bencana	Kab. Garut	20%	300,000,000	DAU		5 desa	500,000,000
	44	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Persentase pemanfaatan sitem peringatan dini per jenis bencana	Kab. Garut	100%	1,000,000,000	DAU		2 unit	2,000,000,000
	45	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Persentase Jumlah kejadian bencana yang di monitoring dan dievaluasi	Kab. Garut	100%	100,000,000	DAU		100%	200,000,000
						20.062.827.968				20.451.154.247

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang di rencanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut mempertimbangkan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Garut Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan nyaman.

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 sejumlah **Rp. 20.062.827.968,-** yang direncanakan terdiri dari 2 Program, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari 8 Kegiatan dan 21 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 10.504.998.668,-
2. Program Penanggulangan Bencana, terdiri dari 4 Kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah anggaran Rp. 9.557.829.300,-.

Tabel 4.1.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi		Indikator Kinerja						Biaya (Rp)					Keterangan		
				Desa/ Kel	Kecamatan	Hasil Program		Keluaran Kegiatan/ Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan/ Sub Kegiatan		APBD II	APBD I	APBN/ PHLN	Sumber Dana Lainnya	Total	Penanggung jawab	Jenis Kegiatan	Keterangan
						Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Urusan Ketentraman dan Keterktiban Lingkungan Masyarakat	Terwujudnya Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang lestari dan Berkelanjutan	Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana																
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					Indeks Kepuasan Masyarakat	78 poin					10.504.998.668				10.504.998.668			
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									Persentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan	100 %	60.000.000				60.000.000			
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersusun	4 dok			30,000,000				30,000,000	Sekretariat	Baru	

2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	4 lap			30,000,000				30,000,000	Sekretariat	Baru	
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									100 %	3.645.654.247				3.645.654.247			
3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Tarogong Kidul (BPBD)		Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	29 orang			3.645.654.247				3.645.654.247	Sekretariat	Baru	
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah									100 %	110.671.621				110.671.621			
4	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah petugas keamanan yang disediakan	4 orang			110.671.621				110.671.621	Sekretariat	Baru	
IV	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									100 %	300.000.000				300.000.000			
5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah pakaian dinas yang disediakan	60 stel			100.000.000				100.000.000	Sekretariat	Baru	

6	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah peserta pelatihan teknis kebencanaan	60 orang			200.000.000				200.000.000	Sekretariat	Baru	
V	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									Persentase pemenuhan kebutuhan layanan administrasi perkantoran.	100 %	545.000.000			545.000.000			
7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	5 jenis			15.000.000				15.000.000	Sekretariat	Baru	
8	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	67 jenis			200.000.000				200.000.000	Sekretariat	Baru	
9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	2 jenis			10.000.000				10.000.000	Sekretariat	Baru	
10	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	6 jenis			30.000.000				30.000.000	Sekretariat	Baru	
11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Tarogong Kidul (BPBD)		Jumlah jenis Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	4 jenis			10.000.000				10.000.000	Sekretariat	Baru	

12	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman	60 orang			30,000,000			30,000,000	Sekretariat	Baru	
13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah waktu rapat-rapat dan koordinasi kedalam dan luar daerah	12 bulan			250.000.000			250.000.000	Sekretariat	Baru	
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah											144.312.000			144.312.000			
14	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik				Tarogong Kidul (BPBD)			Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air	12 bulan			44.312.000			44.312.000	Sekretariat	Baru	
15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Tarogong Kidul (BPBD)			Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan			20.000.000			20.000.000	Sekretariat	Baru	
16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	2 orang			80.000.000			80.000.000	Sekretariat	Baru	
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											799.999.800			799.999.800			
17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Tarogong Kidul (BPBD)			Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan			400.000.000			400.000.000	Sekretariat	Baru	

18	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit			3999.999.800				3999.999.800	Sekretariat	Baru	
VII I	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									Persentase pemenuhan barang milik daerah	100 %	4.899.361.000				1.100.000.000			
19	Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah unit kendaraan operasional yang disediakan	2 unit			399.999.800				399.999.800	Sekretariat	Baru	
20	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah jenis mebel yang disediakan	5 jenis			100.000.000				100.000.000	Sekretariat	Baru	
21	Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah gedung kantor yang dibangun	1 gedung			3.699.361.000				3.699.361.000	Sekretariat	Baru	
B	Program Penanggulangan Bencana					Indeks Kapasitas Daerah	0,4 poin					9.557.829.300				9.557.829.300			
IX	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota									Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	2.312.764 jiwa (100 %)	2.212.439.900				2.212.439.900			
22	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dok			267.271.900				267.271.900	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
23	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana				Tarogong Kidul (BPBD)			Jumlah penyediaan dan penyebaran informasi	1 keg			1.945.168.000				1.945.168.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	

	Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)						penanggula ngan bencana											
X	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana									Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.31 2.76 4 jiwa (100 %)	3.896.723.000			3.896.723.000			
24	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				Kabupat en Garut		Jumlah penyelesai an dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1 dok				221.765.000			300.000.000		Bidang Pencega han dan Kesiapsi agaan	Baru
25	Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota				Kabupat en Garut		Jumlah peserta yang ikut pelatihan	560 orang				300.000.000			300.000.000		Bidang Pencega han dan Kesiapsi agaan	Baru
26	Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota				Kabupat en Garut		Lokasi yang mendapatk an layanan pusdalops	Kab. Garut				238.822.000			238.822.000		Bidang Kedarur atan dan Logistik	Baru
27	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				Kabupat en Garut		Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 paket				1.000.000.000			1.000.000.000		Bidang Kedarur atan dan Logistik	Baru
28	Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana				Kabupat en Garut		Jumlah penyelesai an dokumen IKD sampai dengan sah/legal	1 dok				50.000.000			50.000.000		Bidang Pencega han dan Kesiapsi agaan	Baru

29	Sub Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota				Kabupaten Garut			Pengkajian kebutuhan pasca bencana	1Kab Garut			1.500.000.000				1.500.000.000	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Baru	
30	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota				Kabupaten Garut			Jumlah aparatur yang ikut pelatihan TRC	1 keg			114.560.000				114.560.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
31	Penyusunan Rencana Kontijensi				Kabupaten Garut			Jumlah penyelesaian dokumen Renkon s.d sah/legal per jenis bencana	1 lokasi kab. Garut			171.576.000				171.576.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
32	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana				Kabupaten Garut			Jumlah orang yang ikut gladi dan simulasi penanganan bencana	50 orang			200.000.000				200.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
33	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana				Kabupaten Garut			Jumlah penyelesaian dokumen rencana penanganan kedaruratan bencana sampai dengan sah/legal	3 jenis			100.000.000				100.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Baru	
XI	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								100 orang	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		1.800.000.000				1.800.000.000			
34	Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas				Kabupaten Garut			Lokasi penanganan kasus KLB	1 Kab Garut			200.000.000				200.000.000	Bidang Kedaruratan dan Logistik	Baru	

40	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				Kabupaten Garut		Pembentukan Perda Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan	1 Naskah			148.666.400			148.666.400	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
41	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota				Kabupaten Garut		Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	60 orang			100.000.000			100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
42	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota				Kabupaten Garut		Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	3 desa			300.000.000			300.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
43	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan				Kabupaten Garut		Penyediaan sistem informasi kebencanaan	1 paket			1.000.000.000			1.000.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
44	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				Kabupaten Garut		Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebencanaan	1 keg			100.000.000			100.000.000	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Baru	
											20.062.827.968			20.062.827.968			

Tabel 4.2
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Prakiraan Maju Tahun 2022
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut

No	Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat		78 poin	10.504.998.668	
I	Kegiatan Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat ketepatan penyelesaian dokumen perencanaan		100%	60.000.000	
	1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Tarogong Kidul (BPBD)	4 dokumen	30,000,000	DAU
	2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan kinerja yang tersusun	Tarogong Kidul (BPBD)	4 laporan	30,000,000	DAU

II		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi keuangan		100%	3.645.654.247	
	3	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan	Tarogong Kidul (BPBD)	1 tahun	3.645.654.247	DAU
III		Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi barang milik daerah		100%	110.671.621	
	4	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah petugas keamanan yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	4orang	110.671.621	DAU
IV		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		100%	300.000.000	
	5	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	60 stel	100.000.000	DAU
	6	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pelatihan teknis kebencanaan	Tarogong Kidul	30 orang	200.000.000	DAU

V		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentasi pemenuhan administrasi umum perangkat daerah		100%	545.000.000	
	7	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	5 jenis	15.000.000	DAU
	8	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	67 jenis	200.000.000	DAU
	9	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	2 jenis	10.000.000	DAU
	10	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	6 jenis	30.000.000	DAU
	11	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	4 jenis	10.000.000	DAU

	12	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	waktu pemenuhan fasilitas makanan dan minuman	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	30,000,000	DAU
	13	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan rapat-rapat dan koordinasi kedalam daerah dan luar daerah	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	250.000.000	DAU
VI		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi penunjang urusan pemerintah daerah		100%	144.312.000	
	14	Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	44.312.000	DAU
	15	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	20.000.000	DAU
	16	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	2 orang	80.000.000	DAU

VII		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah		100%	799.999.800	
	17	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu penyediaan jasa pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas	Tarogong Kidul (BPBD)	12 bulan	400.000.000	DAU
	18	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dipelihara	Tarogong Kidul (BPBD)	2 unit	3999.999.800	DAU
VIII		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase pemenuhan barang milik daerah		100%	4.899.361.000	
	19	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah unit kendaraan operasional yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	7 unit	399.999.800	DAU
	20	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel yang disediakan	Tarogong Kidul (BPBD)	5 jenis	100.000.000	DAU

	21	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor yang di bangun	Tarogong Kidul (BPBD)	1 gedung	3.699.361.000	DAU
B		Program Penanggulangan Bencana	Indeks Ketahanan Daerah		0,4poin	9.557.829.300	
IX		Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		2.312.764 jiwa (100%)	2.212.439.900	
	22	Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kab. Garut	1 dok	267.271.900	DAU
	23	Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penyediaan dan penyebarluasan informasi penanggulangan bencana	Kab. Garut	1 keg	1.945.168.000	DAU
X		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		2.312.764 jiwa (100%)	3.896.723.000	

	24	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen RPB	Kab. Garut	1 dok	221.765.000	DAU
	25	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang ikut pelatihan	Kab. Garut	560 orang	300.000.000	DAU
	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	Lokasi yang mendapatkan layanan pusdalops	Kab. Garut	Kab. Garut	238.822.000	DAU
	27	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kab. Garut	1 paket	1.000.000.000	DAU
	28	Pengelolaan Risiko Bencana Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen IKD sampai dengan sah/legal	Kab. Garut	1 dok	50.000.000	DAU
	29	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah penyelesaian dokumen peta kerentanan sampai dengan sah/legal	Kab. Garut	1Kab Garut	-	DAU

	30	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Pengkajian kebutuhan pasca bencana	Kab. Garut	1 keg	1.500.000.000	DAU
	31	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah aparatur yang ikut pelatihan TRC	Kab. Garut	1 lokasi kab. Garut	114.560.000	DAU
	32	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Kontijensi sampai dengan sah/legal per jenis bencana	Kab. Garut	50 orang	171.576.000	DAU
	33	Gladi Kesiapan terhadap Bencana	Jumlah orang yang ikut gladi dan simulasi penanggulangan bencana	Kab. Garut	3 jenis	200.000.000	DAU
	34	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah penyelesaian dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana sampai dengan sah/legal	Kab. Garut	100 orang	100.000.000	DAU
XI		Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		2.312.764 jiwa (100%)	1.800.000.000	

	35	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Lokasi penanganan kasus KLB	Kabupaten Garut	1 Kab Garut	200.000.000	DAU
	36	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terlibat dalam penanggulangan bencana	Kab. Garut	25 orang	1.000.000.000	DAU
	37	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Lokasi Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Kab. Garut	1 Kab Garut	200.000.000	DAU
	38	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan kebutuhan korban bencana	Kab. Garut	500 paket	200.000.000	DAU
	39	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya kerjasama Penanganan Darurat Bencana	Kab. Garut	1 keg	100.000.000	DAU
	40	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik/Wabah Penyakit	Lokasi penanganan bencana non alam epidemi/ wabah penyakit	Kab. Garut	1 Kab Garut	100.000.000	DAU
XII		Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase penguatan kapasitas penanggulangan bencana		60%	1.648.666.400	

	41	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pembentukan Perda Penanggulangan Bencana yang telah disetujui dan disahkan	Kab. Garut	1 Naskah	148.666.400	DAU
	42	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Peningkatan kapasitas penanggulangan bencana	Kab. Garut	60 orang	100.000.000	DAU
	43	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Pembentukan Desa/Kel Tangguh Bencana	Kab. Garut	3 desa	300.000.000	DAU
	44	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Penyediaan sistem informasi kebencanaan	Kab. Garut	1 paket	1.000.000.000	DAU
	45	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya monitoring dan evaluasi kebencanaan	Kab. Garut	1 keg	100.000.000	DAU
						20.062.827.968	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten tahun 2022 dalam rangka pelaksanaan pencegahan penanggulangan bencana, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mendukung Visi Kabupaten Garut 2019-2024 sebagai implementasi rencana pembangunan tahap terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah 2005-2025. Keberhasilan implementasi pelaksanaan pencegahan penanggulangan bencana di Kabupaten Garut, di dasarkan pada komitmen, konsistensi dan konsekuensi, serta partisipasi semua pihak terkait, Pemerintah Tingkat kabupaten dan Non Pemerintah serta Masyarakat, untuk dapat melaksanakan program kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan sasaran kinerja yang direncanakan BPBD Kabupaten Garut, Lembaga Swadaya Masyarakat dan seluruh anggota masyarakat.

Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut, dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, memerlukan penyesuaian sesuai dengan kondisi dan situasi saat ini.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN